

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. (Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia, 2014).
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. (Malang: Penerbit Bayumedia Publisher. 2012)
- Moenir, H.A.S. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000),
- Noeng Muhamdijir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. (Yogyakarta: Penerbit Raka Sarasin,2000)
- Nur Kholis Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta:Imperium, 2013).
- Rahmadana, M.F., Mawati, A.T., Siagian, N., Perangin-Angin, M.A., Refelino, J., Tojiri, M., Siagian, V., Nugraha, N.A., Manullang, S.O., Silalahi, M. and Yendrianof, D., 2020. Pelayanan Publik.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),
- Ristiani, I.Y., Manajemen pelayanan publik pada mall pelayanan publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Coopetition*, 11(2), (2020)
- Sos, J.P.S., *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. (Unisri Press, 2020)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2016).
- Thomas, Richard & Chairman. (2011) *Securing Fairnes dan Redress: Administrative Justice at Risk. (Can Human Right bring social Justice)*. Administrative justice and Tribunals Council
- Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan Publik (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2016)

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri PANRB No. 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden RI No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

### **Jurnal/Internet:**

- Akhmad Soleh, "Kebijakan perguruan tinggi negeri yogyakarta terhadap penyandang disabilitas" *Jurnal pendidikan islam*, No. 3 (Juni, 20, 2014).
- Akib, H., Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 2010, pp.1-11.
- Arianto, D. and Apsari, N.C., Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 2022, pp.156-170.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnbp-tentang-penanganan-perlindungan-dan-partisipasi-penyandang-disabilitas-dalam-pb>. Diakses pada tanggal 13 September 2023, pukul 14.30 WIB.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Peduli Pada Penyandang Disabilitas melalui Program Peningkatan Fungsi Sosial. <https://www.brin.go.id/news>. Diakses 18 November 2023
- Balai POM Surakarta Dorong UMKM Pangan di Sragen Naik Kelas Melalui Sosialisasi. <https://surakarta.pom.go.id/berita/dorong-umkm-pangan-di-sragen-naik-kelas-melalui-sosialisasi>. Diakses pada 4 Januari 2024.
- Dokumen SKM DPMPTSP Kabupaten Sragen. <https://dpmptsp.sragenkab.go.id>. Di iakses 27 Desember 2023
- Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto, "Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi *convention on the rights of persons with disabilities (CPRD)* dalam bidang pendidikan". *Integralistik* 28 No. 1. (Juni, 2017).
- Inge Dwisvimiari Dwisvimiari. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum". *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No.2 (September 22, 2011)
- Isra Yulfia Ningsih,"Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara" *Doctoral Dissertation IPDN*. (Juni 08, 2023).
- Jhody, P.S., 2019. Model Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 1(2), pp.155-183.
- Kabupaten Sragen, <https://mpp.sragenkab.go.id/web/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023
- Kemenko PMK, Pemerintah Perkuat Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. <https://www.kemenko.go.id>. Diakses 19 November 2023
- M. Ghufran H. Kordi K, "Bahasa dan Disabilitas" *BaktiNews* (Desember 21, 2023): <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/bahasa-dan-disabilitas>
- Makbul, M. and Rokhman, A., 2023. Kebijakan Pemerintah dalam Menjamin Hak Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 1(1).
- Marwandianto "Pelayanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM", *Jurnal HAM* 9, No. 2.
- Moduls Penyelenggaraan pada Mal Pelayanan Publik Jawa Barat. <https://dpmptsp.jabarprov.go.id/>. Diakses 27 Desember 2023

- Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, (laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013).
- Nasir, S.A. and Jayadi, A., Penerapan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam di Kota Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2021.
- Nia Karniawati dan Widiyana Apriati, "Aspek Transparansi Dalam Kualitas Pelayanan Pada Penyediaan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di Kota Bandung". *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies* No.1. (Januari 1, 2017).
- Nurinaya N., "Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan Australia Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas". *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3 No.1 (Juli 1, 2021)
- Pawestri, A., 2017. Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).
- Pemerintah Peduli pada Penyandang Disabilitas melalui Program Peningkatan Fungsi Sosial. <https://www.brin.go.id/news>. Diakses 27 Desember 2023.
- Rizal F, "Mengenal Jenis-jenis Disabilitas yang perlu dipahami", halodoc.com (Desember 21,2023), <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-jenis-jenis-disabilitas-yang-perlu-dipahami>.
- Sholeh, "Islam dan penyandang disabilitas: telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 8 No.(2), (2016): 293-320.
- Suharto, E.. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. *Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) "Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik"*. Sahira Butik Hotel (Bogor : LAN, 2008)
- Tarsidi, Didi. Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Layanan Publik. *JASSI ANAKKU: Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*. 11(2), 2011.
- Widyaningrum. (2022) Efektifitas Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung, *JISIPOL*. Jurnal ilmu sosial dan politik. 6 (3)

## **Wawancara**

- Yustina, Wawancara. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sragen (Sragen: 19 Desember 2023)
- Riska, Wawancara. Bagian Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sragen (Sragen: 19 Desember 2023)
- Santika, Wawancara. Dinas Pekerjaan Umum Kota Sragen (Sragen: 27 Desember 2023)

Wahyu Eko, Wawancara, Satpam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen  
(Sragen: 19 Desember 2023)

Widhia, Wawancara. Gerai DPU Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen  
(Sragen: 19 Desember 2023)

## LAMPIRAN

### 1. Surat Permohonan Riset/Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suroyo  
Kampus Universitas Diponegoro  
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275  
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206  
Laman: [www.fh.undip.ac.id](http://www.fh.undip.ac.id), Pos-el: fh@live.undip.ac.id

Nomor : 585 /UN7.F1/AK/X/2023  
Lamp. :  
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

19 OCT 2023

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Jl. Dr. Sutomo No.5 Kebayangan, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen  
Jawa Tengah - Indonesia

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program SI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Schubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama	:	Annisa Rahmawati
NIM	:	11000120120110
alamat	:	Desa Murong Rt 15, Rw 04, Kebonromo, Ngrampal, Sragen
nomor HP	:	087884337548
bidang minat	:	Hukum Administrasi Negara
judul skripsi	:	Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Sebagai Upaya Penghargaan Terhadap Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sragen

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



## 2. Surat Keterangan Jawaban Riset/Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Dr. Sutomo No.5 Sragen, Telp. (0271) 892348, Fax. (0271) 894433  
Website <http://dpmptsp.sragenkab.go.id> dan E-mail: [dpmptsp@sragenkab.go.id](mailto:dpmptsp@sragenkab.go.id)  
SRAGEN - 57211

### Resi Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan

Telah diterima pengajuan permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan dari :

Nama : Annisa Rahmawati  
Alamat : Murong Rt 15, Rw 04, Kebonromo, Ngrampal, Sragen, No. 15, RT. 15/4, Ngrampal , Kabupaten Sragen , Jawa Tengah  
Nomor Ponsel : 087884337548  
Tanggal Terdaftar : 2023-10-31 10:47:00  
Nomor Resi : 92022231

Judul :

- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA PENGHARGAAN TERHADAP MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SRAGEN

\*Mengupload dokumen Izin Praktik Kerja Lapangan

Melampirkan :

1. KTP/ Tanda Pengenal Lainnya;
2. Surat Pengantar dari Instansi/Institusi.
3. Proposal

### **3. Pertanyaan Wawancara**

1. Apa yang melatarbelakangi uji coba penyandang disabilitas pada pertengahan Desember Tahun 2022?
2. Apakah sebelumnya ada masyarakat disabilitas yang berkunjung di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen?
3. Apa permasalahan yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen?
4. Akses apa saja yang diberikan mal pelayanan publik kepada masyarakat penyandang disabilitas hingga tahun 2023?
5. Apakah ada tempat pelayanan khusus untuk melayani masyarakat penyandang disabilitas di Mal Pelayanan Publik?
6. Apakah di Mal Pelayanan Publik terdapat jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas?
7. Apakah ada regulasi di Mal Pelayanan Publik yang mengatur mengenai penyandang disabilitas secara khusus?
8. Apakah regulasi tersebut sudah mengakomodir pelayanan terhadap penyandang disabilitas?
9. Apa hambatan dan kendala dalam penerapan regulasi mengenai penyandang disabilitas?
10. Bagaimana solusi yang tepat dalam meningkatkan pelayanan mal pelayanan publik di Kabupaten Sragen?

#### 4. Dokumentasi

